

# Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pendidikan hak asasi manusia bagi generasi muda

**M. Taufiqur Rohman**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: muhammadtaufiqurrohman770@gmail.com

## Kata Kunci:

Pancasila; hak asasi manusia; generasi muda; keadilan; kemanusiaan.

## Keywords:

Pancasila; human rights; young generation; justice; humanity.

## ABSTRAK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi tantangan besar yang menghambat terciptanya keadilan sosial dan mencederai martabat bangsa. Upaya penegakan HAM tidak bisa hanya bergantung pada regulasi hukum semata, melainkan memerlukan dukungan pendidikan moral dan pembentukan karakter sejak dini. Penelitian ini bertujuan menelaah peran vital nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengembangan pendidikan HAM bagi generasi muda. Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, menggali data dari berbagai jurnal ilmiah dan referensi

akademik terkait. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip universal HAM yang khas, seperti pengakuan harkat martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan. Mengintegrasikan nilai-nilai luhur ini ke dalam kurikulum pendidikan dan kehidupan sosial merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi penerus yang humanis, toleran, dan berkomitmen melindungi hak sesama manusia.

## ABSTRACT

Human Rights (HAM) violations remain a major challenge that hinders social justice and harms the nation's dignity. Efforts to enforce human rights cannot rely solely on legal regulations but require the support of moral education and character building from an early age. This study aims to examine the vital role of Pancasila values as a philosophical foundation in the development of human rights education for the younger generation. This study applies a qualitative descriptive method with a literature approach, exploring data from various scientific journals and related academic references. The findings show that the five precepts of Pancasila contain distinct universal human rights principles, such as recognition of human dignity, justice, and equality. Integrating these noble values into the education curriculum and social life is a strategic step to produce a future generation that is humanist, tolerant, and committed to protecting the rights of others.

## Pendahuluan

Isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama menjadi perhatian utama dalam perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan norma sosial dan budaya di era modern sering kali menyebabkan munculnya bentuk-bentuk pelanggaran hak yang baru, mulai dari sikap intoleran sampai cyberbullying. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menghormati martabat manusia (Yusuf et al., 2023).



Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pemulihan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda, terutama mahasiswa, yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan dan pemimpin masa depan, perlu menyadari betapa pentingnya HAM. Namun, faktanya, masih banyak pemuda yang menunjukkan sikap acuh tak acuh atau bahkan terlibat dalam tindakan yang melanggar hak orang lain. Penilaian tentang pelanggaran hak sering kali menjadi tidak objektif saat pelakunya adalah kelompok sendiri (Aswandi & Roisah, 2019).

Dalam perspektif tanggung jawab negara dan aparaturnya, sebagaimana dikaji oleh (Zarwaki et al., 2022), penegakan HAM harus dilandasi prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum yang adil, tanpa diskriminasi maupun keberpihakan kelompok. Dengan demikian, sinergi antara pendidikan nilai Pancasila, kesadaran generasi muda, dan komitmen institusi negara menjadi fondasi penting dalam membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia secara konsisten.

Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan formal maupun non-formal menjadi langkah yang sangat penting. Di samping lembaga pendidikan, peran keluarga sebagai unit sosial terkecil juga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk karakter anak yang menghormati hak asasi. Melalui interaksi yang positif dalam keluarga, prinsip-prinsip kemanusiaan dapat ditanamkan sejak usia dini.

#### **Latar Belakang Hak Asasi Manusia**

Isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah hal baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak masa kolonial, tindakan penindasan dan pengabaian terhadap hak-hak dasar manusia telah terjadi dan tersimpan dalam ingatan kolektif masyarakat, baik di sektor pemerintahan maupun kehidupan sosial. Setelah meraih kemerdekaan, tantangan dalam melindungi hak asasi tidak langsung hilang, tetapi justru berubah seiring dengan ketidaksempurnaan sistem perlindungan hukum dan rendahnya kesadaran etis sebagian masyarakat (Musataklima et al., 2023).

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan yang merata di berbagai lapisan sosial, yang pada akhirnya menghalangi pembangunan karakter bangsa dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga keadilan negara. Situasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan krisis moral dan budaya yang sudah cukup mendalam dalam interaksi interpersonal.

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang hanya berlandaskan pada penerapan hukum dianggap tidak memadai tanpa didukung oleh pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa memegang peran yang sangat penting. Nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya, seperti kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial, dapat menjadi landasan utama dalam pendidikan HAM untuk membentuk generasi muda yang memiliki integritas, toleransi, dan siap menjadi agen perubahan yang memanusiakan sesama (Aswandi & Roisah, 2019).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keadaan dan hambatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana prinsip-prinsip mulia Pancasila dapat dibentuk sebagai dasar filosofis untuk pendidikan HAM?
3. Apa saja pendekatan dalam penerapan pendidikan HAM yang mengusung perspektif Pancasila untuk generasi muda di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mempelajari perkembangan situasi penegakan hak asasi manusia (ham) di tanah air saat ini.
2. Menjelaskan pentingnya nilai-nilai pancasila sebagai fondasi utama dalam kemajuan pendidikan ham.
3. Mencari pola penerapan pendidikan ham yang berasaskan nilai pancasila di antara pemuda indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis berbagai referensi seperti jurnal akademis, buku teks, laporan dari lembaga yang relevan, dan artikel yang dapat dipercaya. Proses analisis data dilakukan dengan membandingkan teori yang ada, mengevaluasi hasil penelitian sebelumnya, serta menggali keterkaitan mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan Hak Asasi Manusia.

### **Pembahasan**

#### **Tantangan Penegakan HAM di Indonesia**

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih mengalami banyak rintangan. Sama seperti masalah korupsi yang tampaknya sudah menjadi budaya, pelanggaran HAM biasanya bersumber dari lemahnya moral. Walaupun peraturan hukum sudah ada, penerapannya sering kali tidak efektif tanpa adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021).

#### **Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif HAM**

(Faslah, 2025) menjelaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan panduan normatif yang membentuk karakter warga negara agar menjunjung tinggi etika publik dan tata kelola yang bersih. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan HAM sekaligus mencegah tindakan koruptif dalam berbagai sektor kehidupan. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip dasar yang menjadi fondasi etika untuk melindungi hak asasi manusia, sama halnya fungsinya dalam menghindari tindakan korupsi:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Sila ini menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan berkah dari Tuhan. Melanggar hak asasi adalah seperti menolak iman kepada Tuhan. Kebebasan beragama serta berkeyakinan adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar dan dijamin oleh sila ini.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Ini adalah inti dari hak asasi manusia. Sila ini mengharuskan cara memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan dan keadilan. Tindakan diskriminasi serta kekerasan jelas bertentangan dengan nilai keberadaban ini.
3. Sila Persatuan Indonesia: Dalam sudut pandang hak asasi manusia, persatuan berarti menghormati keberagaman. Pelanggaran terhadap hak-hak kelompok minoritas dapat menyebabkan konflik yang merusak persatuan bangsa.
4. Sila Kerakyatan: Menjamin hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Keputusan yang diambil secara otoriter tanpa musyawarah adalah sebuah pelanggaran terhadap hak untuk berpartisipasi dari warga negara.
5. Sila Keadilan Sosial: Menjamin hak dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Ketidakadilan dalam akses serta distribusi sumber daya merupakan musuh dari sila yang kelima. Pendidikan HAM Berbasis Karakter

Pendidikan HAM bukan hanya sekadar penyampaian ilmu tentang hukum, tetapi juga sebuah usaha untuk membentuk karakter yang memiliki integritas. Penanaman nilai-nilai Pancasila yang mulia akan menciptakan generasi muda dengan prinsip yang kuat, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh perilaku yang negatif (Aswandi & Roisah, 2019).

Nilai-nilai kemanusiaan dan etika sosial perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Implementasi tersebut tidak hanya berbentuk materi pembelajaran, tetapi juga tercermin dalam keteladanan guru dan dosen sebagai figur profesional yang menunjukkan sikap adil, inklusif, dan toleran dalam praktik keseharian. Peran pendidik yang profesional, sebagaimana ditegaskan oleh (Mulloh & Muslim, 2022). sangat dipengaruhi oleh supervisi pendidikan yang efektif dalam membina kompetensi, integritas, dan tanggung jawab moral.

Lingkungan belajar juga harus dikondisikan sebagai ruang aman yang bebas dari perundungan dan diskriminasi, sehingga setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan berkembang secara optimal. Selain itu, ruang ekspresi kreatif—melalui seni, dialog, maupun forum diskusi—perlu diperluas guna mendorong partisipasi aktif siswa dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan secara konstruktif (Syahputra, 2025).

## **Kesimpulan dan Saran**

Pancasila memiliki peranan yang penting sebagai landasan moral dalam pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui metode pendidikan yang berfokus

pada nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat dikembangkan menjadi individu yang menghargai keadilan, kesetaraan, dan kepedulian sosial.

Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hak asasi manusia. Pemerintah diharapkan untuk memperkuat kebijakan tentang pendidikan karakter, sedangkan masyarakat harus berperan aktif sebagai pengawas sosial. Dengan langkah ini, diharapkan akan muncul generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga peka hati dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan bermartabat.

Lebih lanjut, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan HAM tidak cukup dilakukan pada tataran kognitif semata, melainkan harus menyentuh dimensi afektif dan praksis. Pendidikan hendaknya dirancang melalui pendekatan partisipatif yang memberi ruang dialog, refleksi kritis, serta pembiasaan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman tentang hak dan kewajiban tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi menjadi karakter yang tertanam dalam perilaku peserta didik.

Selain itu, penguatan literasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak di era globalisasi. Generasi muda perlu dibekali kemampuan menyaring informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari ujaran kebencian dan intoleransi di ruang digital. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etis dalam bermedia sosial dan berinteraksi di tengah masyarakat yang majemuk.

Dari sisi kebijakan, diperlukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila. Lembaga pendidikan dapat menyusun program terukur yang mengintegrasikan kegiatan akademik dan nonakademik, seperti pengabdian masyarakat, diskusi kebangsaan, serta kegiatan sosial yang menumbuhkan empati dan solidaritas.

Dengan komitmen bersama dan implementasi yang konsisten, pendidikan berbasis Pancasila diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memahami hak asasi manusia secara konseptual, tetapi juga berani menegakkannya secara adil, humanis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Daftar Pustaka

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Mulloh, T., & Muslim, A. Q. (2022). Analisis peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalitas guru. *Journal Publicuho*, 5(3), 763–775. <https://repository.uin-malang.ac.id/12130/>

- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam. *Jurnal HAM*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154>
- Syahputra, A. R. (2025). Analisis Kemampuan Institusi Pendidikan Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Ramah Bagi Siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629, 3(2), 616–621.
- Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 511–519.
- Zarwaki, Z., Aunur, R., & Suwandi, S. (2022). Implementasi tanggung jawab negara dan aparaturnya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas perspektif teori kedaulatan rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6909–6919. <https://repository.uin-malang.ac.id/12795/>